Penerapan Manajemen Pembiayaan dalam Mengembangkan Sarana Prasarana Pembelajaran di SMPN Kabupaten Gowa

Nur Yuliany[1*], Eryanti Wahyuningsih[2], Baharuddin[3], Munirah[4]
[1]Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa, Indonesia. 92118
[2]Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa, Indonesia. 92118
[3]Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa, Indonesia. 92118
[4]Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa, Indonesia. 92118
nur.yuliany@uin-alauddin.ac.id[1*], eryanti.wahyuningsih@gmail.com[2], bahar.baharuddin@uin-alauddin.ac.id[3], munirah.rusydi@uin-alauddin.ac.id[4]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan manajemen pembiayaan dalam mengembangkan sarana dan prasarana (sarpras) pembelajaran di SMP. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dihimpun dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarpras, kepala tata usaha, bendahara, dan guru melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan manajemen pembiayaan sarpras terlaksana melalui empat tahapan: 1) perencanaan partisipatif berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dituangkan dalam RKAS; 2) pelaksanaan sepanjang tahun menggunakan dana BOS untuk pengadaan dan pemeliharaan; 3) pengawasan internal oleh kepala sekolah secara bulanan serta pengawasan eksternal oleh pengawas dan inspektorat setiap semester; dan 4) evaluasi berkala sebagai dasar perbaikan program. Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah komitmen pimpinan dan kerja sama lintas stakeholder. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran (dominasi dana BOS), konsistensi koordinasi guru, dan keterbatasan SDM pengelola keuangan. Implikasi penelitian menegaskan bahwa efektivitas pengembangan sarpras sangat bergantung pada integrasi perencanaan partisipatif, keseimbangan alokasi anggaran, pengawasan transparan, serta evaluasi berkelanjutan.

Kata Kunci: manajemen pembiayaan; sarana dan prasarana; dana BOS; sekolah menengah pertama

Abstract

This study aims to describe the implementation of financial management in developing learning facilities and infrastructure at a junior high school. Utilizing a descriptive qualitative approach, data were gathered from the principal, vice-principal of facilities, head of administrative affairs, treasurer, and teachers through interviews, observation, and documentation. Data analysis involved reduction, display, and conclusion drawing, with validity ensured via triangulation. The results indicate that financial management for facilities follows four stages: 1) participatory planning based on National Education Standards (SNP) outlined in the School Activity and Budget Plan (RKAS); 2) year-round implementation utilizing School Operational Assistance (BOS) funds for procurement and maintenance; 3) monthly internal supervision by the principal and semester-based external supervision by school inspectors; and 4) periodic evaluation for future program improvements. Supporting factors include leadership commitment and stakeholder

cooperation. Conversely, inhibiting factors comprise budget constraints (BOS dependence), inconsistent teacher coordination, and limited financial management expertise among staff. The implication underscores that effective facilities development heavily relies on the integration of participatory planning, balanced budget allocation, transparent supervision, and continuous evaluation.

***Keywords**: financial management; facilities and infrastructure; BOS funds; junior high school*

***Article History:** Submitted 11 March 2026; Revised 26 May 2026; Accepted 29 May 2026*
How to Cite: Yuliany, N., Wahyuningsih, E., Baharuddin, & Munirah. (2026). Penerapan manajemen pembiayaan dalam mengembangkan sarana prasarana pembelajaran di SMPN kabupaten Gowa. *Al asma: Journal of Islamic Education*, *8*(1), 71-83. https://doi.org/10.24252/asma.v8i1.66389

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa, karena kualitas pendidikan yang ada di suatu negara dapat menjadi indikator kemajuan bangsa tersebut. Dalam konteks ini, kualitas pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu faktor penentu kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, buruknya kualitas pendidikan dapat menyebabkan ketertinggalan pendidikan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kemajuan bangsa atau negara tersebut (Kurniawati, 2022).

Pada dasarnya, salah satu faktor yang menjadi penghambat kualitas pendidikan terletak pada kualitas sarana dan prasarana yang ada di setiap lembaga pendidikan. Hal tersebut akan sulit tercapai apabila tidak didukung dengan penyediaan biaya yang memadai, bahkan jika penerapan pembiayaannya kurang optimal (Utami, 2020). Sehingga, upaya untuk menyelenggarakan dan meningkatkan sistem pendidikan yang berkualitas sangat memerlukan pembiayaan. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang sangat penting, dan dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan biaya.

Pembiayaan pendidikan adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, penerapan manajemen pembiayaan yang ada di setiap lembaga sekolah sangatlah penting (Yudianto dkk., 2021). Oleh karenanya, dalam mencapai kualitas pendidikan yang optimal, manajemen pembiayaan yang baik dan efisien di setiap sekolah sangat diperlukan. Manajemen pembiayaan yang tepat akan memastikan tersedianya sumber daya yang cukup dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.

Manajemen pembiayaan adalah suatu proses yang mencakup seluruh langkah dalam upaya memperoleh dan mendistribusikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian, sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Proses ini menuntut agar pengelolaan biaya selalu dilakukan dengan pengawasan yang ketat, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas (Sa'diah, 2021).

Dalam manajemen pembiayaan, salah satu sasaran prioritasnya adalah terciptanya pengembangan kualitas sarana dan prasarana yang memadai di setiap lembaga sekolah. Sarana dan prasarana menjadi salah satu sumber daya pendidikan yang sangat penting untuk dikelola dengan baik, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan. Contohnya meliputi gedung, tanah, perlengkapan administrasi, sampai pada sarana yang digunakan langsung dalam proses belajar-mengajar di kelas

(Rohimin dkk., 2024). Sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ruang kelas yang nyaman, alat pembelajaran yang memadai, serta fasilitas pendukung seperti laboratorium dan perpustakaan sangat mendukung tercapainya hasil pendidikan yang optimal. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang cukup dan berkualitas, proses belajar-mengajar menjadi kurang efektif dan tidak maksimal.

Tahapan yang dilalui dalam manajemen pembiayaan adalah dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang populer digunakan di Indonesia yaitu *planning* (perencanaan), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan) (Fadhila, 2024).

Syafaruddin mengkategorikan tiga kelompok utama sumber pendanaan pendidikan. Pertama, dana dari pemerintah, yang termasuk kontribusi dari pemerintah pusat dan daerah, baik bersifat umum maupun khusus, dan dialokasikan untuk keperluan pendidikan. Ukuran dana ini bergantung pada kebijakan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan ditentukan dengan mempertimbangkan prioritas. Sumber pembiayaan dari pemerintah bisa mencakup berbagai hal, mulai dari dana untuk sarana dan prasarana, buku, dan lainnya (Hakim & Atoillah, 2024),

Pengembangan sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting yang harus dipenuhi dalam menunjang sistem pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai segenap proses pengadaan dan pendayagunaan komponen secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang proses pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Majid, 2021).

Pengembangan sarana dan prasarana merupakan proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai kegiatan pembelajaran. Pengembangan sarana prasarana ini sangat dipengaruhi oleh penerapan manajemen pembiayaan di sekolah. Sekolah bertanggung jawab untuk mengelola pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang tepat, agar dana yang tersedia dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan tersebut (Fadli, 2023).

Hasil observasi awal yang dilakukan menemukan bahwa sumber pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut sepenuhnya bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola oleh bendahara sekolah. Keterbatasan sumber dana menjadi kendala signifikan, terutama dalam pengembangan infrastruktur pendukung pembelajaran. Data yang didapat menunjukkan bahwa dari total anggaran yang diterima, hanya sekitar 40% yang dapat dialokasikan untuk pengembangan sarana prasarana sekolah. Kondisi ini mengharuskan pihak manajemen sekolah melakukan prioritasisasi yang ketat dalam pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan.

Permasalahan lain adalah kurangnya koordinasi antarpihak yang memiliki wewenang dalam pengelolaan pembiayaan, serta lemahnya sistem pengawasan terhadap fasilitas yang telah ada. Fenomena ini mengakibatkan banyak sarana mengalami penurunan kualitas tanpa adanya tindakan perbaikan yang memadai. Dampaknya terlihat pada kondisi infrastruktur yang belum mencapai standar optimal, ditandai dengan masih banyaknya ruang kelas yang menggunakan peralatan pembelajaran yang sudah usang. Keterbatasan media pembelajaran berbasis teknologi juga menjadi tantangan tersendiri, dengan jumlah proyektor LCD dan komputer yang tidak memadai untuk mendukung

proses pembelajaran interaktif di era digital. Selain itu, perpustakaan sekolah mengalami masalah keterbatasan koleksi buku, khususnya referensi yang relevan dengan implementasi kurikulum terkini. Situasi ini berpotensi menghambat upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi siswa sesuai dengan tuntutan pendidikan digital.

Sejalan dengan fakta tersebut, faktor penghambat dalam pengembangan sarana prasarana adalah terbatasnya pembiayaan baik operasional maupun pengadaan, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya kesadaran warga sekolah dalam membantu pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kurang optimalnya implementasi manajemen sarana dan prasarana di sekolah (Nauraida & Triwiyanto, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan berbagai metode terfokus, melibatkan interpretasi, dan menerapkan pendekatan alami terhadap materi atau subjek yang diteliti. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan catatan yang lebih rinci, lengkap, dan mendalam guna menggambarkan situasi yang sebenarnya. Hal ini ditujukan untuk mendukung penyajian data mengenai penerapan manajemen pembiayaan dalam mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran.

Data primer adalah data mentah atau data yang didapat secara langsung dari responden atau target yang diamati. Adapun yang termasuk sebagai data primer dalam hal ini adalah hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana (Wakasek Sarpras), bendahara, kepala tata usaha, serta guru. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan berupa dokumen, laporan, dan arsip. Peneliti mendapatkan data siap pakai yang telah dikumpulkan oleh pihak lain melalui berbagai metode, baik secara komersial maupun nonkomersial. Data tersebut merupakan catatan atau dokumen penting yang sengaja disimpan untuk menjadi bahan analisis. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumentasi foto penghargaan dalam penerapan manajemen pembiayaan, rekaman suara hasil wawancara bersama informan yang diamati, dokumen laporan penggunaan keuangan atau dana sekolah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis atau pengolahan data yang diterapkan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber lain sebagai pembanding terhadap data yang didapatkan berdasarkan proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini dikarenakan data yang sejenis akan lebih valid kebenarannya apabila digali dari sumber yang berbeda. Selanjutnya, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda pada sumber yang sama. Langkah ini dilakukan guna memperoleh kebenaran informasi yang andal serta gambaran yang utuh mengenai data tersebut melalui metode yang bervariasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diketahui bahwa penerapan manajemen pembiayaan dalam mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran telah memuat beberapa prinsip dasar manajemen yang terstruktur. Prinsip-prinsip tersebut meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan telah berupaya menerapkan manajemen pembiayaan secara terencana dan sistematis guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran. Selain itu, dalam proses pelaksanaannya, ditemukan berbagai hambatan yang menghambat optimalisasi pengembangan, namun di sisi lain juga terdapat faktor-faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaan program tersebut.

Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam manajemen pembiayaan. Perencanaan adalah tahap awal dalam manajemen pembiayaan pendidikan, yang melibatkan proyeksi tentang tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses perencanaan ini mencakup aktivitas seperti mengidentifikasi dan memilih kebutuhan dengan mempertimbangkan prioritas, serta menetapkan persyaratan atau kriteria untuk memenuhi setiap kebutuhan (Afifah & Falah, 2024). Di SMP, proses perencanaan manajemen pembiayaan dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan kolaboratif. Perencanaan ini merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam memastikan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan sesuai kebutuhan. Penyusunan rencana anggaran tidak hanya melibatkan pimpinan sekolah, tetapi juga para guru, staf tata usaha, dan komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat. Adapun yang termasuk dalam perencanaan yaitu:

Rapat Koordinasi

Tahap awal dalam proses perencanaan pengembangan sarana prasarana yakni diawali dengan kegiatan rapat koordinasi. Rapat ini menjadi langkah strategis untuk menyusun rencana kebutuhan sekolah dengan anggaran yang ada. Seluruh elemen penting di lingkungan sekolah, yaitu
wawancara bersama Kepala Sekolah beliau menyatakan bahwa:

> Proses penyusunan rencana anggaran di sekolah kami dimulai dengan rapat teknis yang dilakukan di awal tahun ajaran yang melibatkan seluruh personel sekolah, termasuk para guru, staf tata usaha, dan komite sekolah. Dalam rapat tersebut, masing-masing pihak menyampaikan usulan terkait kebutuhan sarana infrastruktur yang dirasa penting dan mendesak. Salah satu pihak yang kami libatkan secara aktif adalah para guru. Mereka inilah yang merasakan langsung bagaimana kondisi fasilitas di kelas saat mengajar. Jadi, pendapat mereka sangat penting dalam mengidentifikasi apa saja yang perlu atau ditambah.

Lebih lanjut, kepala sekolah juga menjelaskan siapa saja pihak yang aktif dilibatkan dalam penyusunan rencana pembiayaan tersebut:

> Dalam rencana perencanaan pembiayaan sarana dan prasarana, kami melibatkan beberapa unsur penting.selain kepala sekolah, di antaranya bendahara sekolah, karena beliau yang memahami detail alokasi anggaran dan pencatatan keuangan. Operator sekolah kami libatkan, karena mereka yang mengelola data dan dokumen pendukung, termasuk input ke dalam sistem pelaporan seperti Dapodik. Komite

> sekolah ikut terlibat sebagai perwakilan dari wali murid. Mereka kami ajak inisiatif agar perencanaan yang dibuat juga mendapat dukungan dari masyarakat, terutama dalam hal pengawasan dan usulan.

Lebih lanjut kepala Sekolah juga menyampaikan bahwa perencanaan yang mereka lakukan ini mengacu paad Standar Nasional Pendidikan sarabna Prasrana. Beliau Menyampaikan bahwa:

> Dalam menyusun perencanaan sarana prasarana, kami memang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Misalnya, jumlah ruang kelas harus sesuai dengan rombongan belajar yang ada, luas ruang kelas harus memenuhi standar kenyamanan, dan fasilitas seperti perpustakaan serta laboratorium wajib tersedia. Jadi setiap awal tahun ajaran, kami selalu melihat kembali kondisi sarana prasarana sekolah. Kalau ada yang belum sesuai, misalnya jumlah koleksi buku perpustakaan yang masih kurang atau fasilitas laboratorium IPA yang belum lengkap, itu kami masukkan sebagai prioritas dalam RKAS.

Selain kepala sekolah, bendahara juga memiliki peran penting dalam proses perencanaan anggaran, khususnya dalam memastikan bahwa rencana yang disusun sesuai dengan kondisi keuangan sekolah. Keterlibatan bendahara sangat diperlukan agar setiap program yang dirancang realistis dan dapat direalisasikan tanpa melampaui kemampuan anggaran. Hal ini dijelaskan dalam pernyataannya:

> Ya, tentu saja bendahara sangat dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran, termasuk untuk pengembangan sarana dan prasarana. Bendahara memahami secara detail tentang kondisi keuangan sekolah. Jadi, keterlibatan kami sangat dibutuhkan agar rencana yang dibuat realistis dan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Dalam rapat penyusunan anggaran, bendahara biasanya menyampaikan alokasi dana yang memungkinkan, memperhitungkan kebutuhan lain di sekolah, dan memastikan bahwa perencanaan yang disusun tidak melampaui kapasitas keuangan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, sejalan dengan hasil wawancara kepala Tata Usaha mengatakan bahwa:

> Sebagai kepala TU, peran kami lebih banyak pada pendataan dan penyusunan administrasi kebutuhan sarana prasarana. Biasanya dalam rapat kerja sekolah, kami dari bagian TU mengumpulkan kebutuhan data dari setiap wali kelas, guru, maupun bagian lain seperti perpustakaan dan laboratorium.

> Bapak Andi Agus sebagai Waka sarpras, juga mengatakan bahwa:

> Yang dilibatkan dalam proses perencanaan sarana dan prasarana itu bukan hanya pihak pimpinan sekolah saja, tetapi juga melibatkan guru- guru dan tenaga kependidikan. Kami juga selalu melibatkan komite sekolah. Hal ini kami lakukan agar perencanaan yang disusun benar- benar sesuai dengan kebutuhan yang memang kami butuhkan di lapangan.

Pernyataaan dari beberapa informan di atas sejalan dengan teori George R. Terry yang menyatakan bahwa perencanaan adalah upaya menentukan tujuan dan merumuskan cara terbaik untuk mencapainya dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif. Dalam praktiknya, perencanaan yang dilakukan telah mencerminkan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi walaupun dibatasi oleh minimnya dana operasional sekolah, khususnya dari sumber utama yaitu Dana BOS (Aljannah & Khoiri, 2023).

Identifikasi Tingkat Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan bertujuan untuk menganalisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar dan mengajar. Adapun kebutuhan ini disesuikan mulai dari yang mendesak seperti pengadaan buku paket dan perbaikan pada fasilitas sekolah dan harus disesuaikan dengan yang ada di juknis. Dalam wawancara lanjutan bersama Waka sarpras, beliau mengatakan bahwa:

> Dalam rapat itu, masing-masing pihak menyampaikan kondisi sarana dan prasarana yang menurut mereka perlu mendapat perhatian Misalnya, kalau ada toilet yang rusak atau peralatan belajar yang benar- benar dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar, itu kami tempatkan di prioritas utama. Jadi, bukan hanya melihat dari sisi kerusakan fisik, tapi juga dampaknya terhadap kenyamanan dan kelancaran proses pembelajaran.

Berdasarkan pada pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataaan Bendahara Sekolah yakni:

> Jadi, biasanya kami mendata barang dibutuhkan yang mendesak yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, mereka akan menyusun daftar kebutuhan secara rinci, termasuk spesifikasi barang, jumlah, dan perkiraan harga. Dalam rapat ini akan dibahas apakah pengadaan itu memang sesuai dengan skala prioritas sekolah, apakah anggarannya tersedia dalam RKAS, dan apakah kebutuhan yang disebutkan itu ada dalam juknis yang telah ada.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa proses identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak. Sekolah secara rutin mendata barang-barang yang mendesak untuk mendukung proses pembelajaran, kemudian menyusun daftar kebutuhan secara rinci, mencakup spesifikasi, jumlah, dan estimasi biaya.

Penyusunan Rencana Anggaran yang dibutuhkan

Setelah kebutuhan sarana dan prasarana diidentifikasi secara rinci, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak SMP adalah menyusun rencana anggaran sebagai acuan dalam pengadaan dan pengembangan fasilitas tersebut. Penyusunan anggaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan yang telah diprioritaskan dapat diakomodasi secara realistis sesuai dengan kemampuan keuangan sekolah.
Sebagaimana wawancara lanjutan bersama dengan Bendahara Sekolah, beliau mengatakan bahwa:

> Jadi, rincian anggaran itu kami dasarkan pada daftar kebutuhan yang diajukan oleh waka sarpras dan disetujui kepala sekolah. Kami hitung secara rinci spesifikasi

barang, jumlah, dan harga perkiraan berdasarkan harga pasarnya. Seluruh anggaran ini kami sesuaikan dengan pegangan dana yang tersedia dalam RKAS. Jika dana tidak mencukupi, kami juga akan membuat catatan atau membuat proposal pengadaan usulan untuk mencari alternatif sumber dana.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala SMP beliau mengatakan bahwa:

Prosedur penggunaan dana di sekolah dilakukan secara bertahap dan sangat memperhatikan kebutuhan dana yang sudah ditetapkan dalam RKAS. Jadi, tidak sembarang mengeluarkan dana. Awalnya kami melakukan rapat koordinasi dengan guru, waka sarpras bendahara dan komite sekolah untuk mematsikan bahwa semua kebutuhan sudah dirumuskan secara realistis. Setelah itu, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus mengacu pada anggaran yang sudah ada dalam juknis.

Selaras dengan pernyataan di atas, Waka Sarpras juga menyatakan bahwa:

Sebelum penyusunan anggaran, kami melakukan pendataan dan analisis kebutuhan sarpras seperti kebutuhan guru yang membutuhakn pupen, spidol dan penghapus. Kebutuhan kelas lain seperti daftar hadir siswa juga disiapkan. Setelah itu, saya menyusun daftar kebutuhan lengkap dengan spesifikasi teknis dan perkiraan biaya. Daftar ini saya bawa ke rapat bersama kepala sekolah dan bendahara untuk disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Dalam rapat itu, kami juga melihat manfaatnya bagi proses belajar mengajar seperti apaa jadi tidak sekedar mengadakan kebutuhan kebutuhan sekolah.

Dari hasil pernyataan di atas sejalan dengan teori yang ditemukan bahwa Langkah penting dalam penyusunan perencanaan keuangan pendidikan adalah pertimbangan pada perkiraan biaya dan kebutuhan sekolah untuk melaksanakan rencana. Hal tersebut penting untuk pendanaan tujuan pendidikan, semua kegiatan dan tugas-tugas diidentifikasi, yang memiliki implikasi keuangan, harus dihitung biayanya dengan baik dan menganggarkan secukupnya (Fadilah dkk., 2023).

Sejalan dengan temuan tersebut, hasil penelitian yang didapat juga menunjukkan bahwa proses perencanaan pembiayaan dilakukan melalui rapat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan ketersediaan dana, hasil evaluasi sarana-prasarana, dan skala prioritas. Penyusunan RAPBS melibatkan identifikasi sumber dana dan evaluasi keuangan agar setiap kebutuhan, termasuk infrastruktur pendukung pembelajaran, dapat diakomodasi secara tepat. Hal ini menegaskan bahwa perencanaan yang matang dengan melibatkan seluruh pihak, serta mengacu pada standar pendidikan, menjadi kunci dalam memastikan tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien (Shabrina & Khoiriyah, 2024).

Pelaksanaan merupakan tahap realisasi dari perencanaan yang dilakukan sebelumnya. Proses pelaksanaan ini melibatkan beberapa tahapan mulai dari penyaluran, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana. Bapak Ismail selaku kepala Sekolah menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan untuk pengembangan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan rencana yang sudah disusun dalam RKAS. Beliau menyampaikan bahwa:

Kami melaksanakan pembiayaan sarpras itu berdasarkan RKAS yang sudah

> dirancang sebelumnya. Biasanya, kebutuhan yang sudah diidentifikasi akan dibahas dulu dalam rapat. Kami pastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar untuk hal yang prioritas dan menunjang pembelajaran. Kalau misalnya ada kebutuhan yang sangat mendesak seperti perbaikan toilet tapi belum tercantum di RKAS, kami akan carikan alternatif, misalnya dengan mengajukan proposal ke dinas.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Bendahara sekolah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan, ia bertugas menyusun dan merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kebutuhan yang diajukan oleh waka sarpras. Setiap pengeluaran didasarkan pada perhitungan yang cermat dan disesuaikan dengan ketersediaan dana. Selain itu, bendahara juga memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan secara tertib, akuntabel, dan didukung oleh bukti administrasi seperti nota, kuitansi, dan dokumen pelaporan lainnya. Hal ini bertujuan agar proses pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif:

Setelah ada daftar kebutuhan dari waka sarpras, kami cek dulu anggarannya di RKAS. Kalau memang dananya tersedia, kami langsung proses pengadaannya sesuai aturan, biasanya langung membeli. Kemudian semua pengeluaran ini dicatat dan disimpan buktinya, mulai dari nota pembelian sampai dokumen laporan keuangan. Kami juga selalu laporkan ke kepala sekolah dan untuk diperiksa kapan saja.

Untuk memperjelas pelaksanaan di lapangan, Waka Sarpras menjelaskan bahwa pengelolaan dana tidak hanya diarahkan pada pengadaan sarana baru, tetapi juga pemeliharaan sarpras yang sudah ada. Ia menyatakan:

> Sebagaimana diungkapkan oleh Waka Sarpras bahwa:
>
> Kami juga mengedepankan efisiensi penggunaan dana. Pengadaan barang dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas, harga pasar, dan keberlanjutan penggunaannya. Selain itu, kami juga mengalokasikan sebagian dana untuk pemeliharaan, seperti pengecatan ruang kelas yang kami lakukan setiap 2 tahun sekali , perbaikan meja dan kursi, perawatan toilet, dan kebersihan lingkungan sekolah. Evaluasi terhadap hasil pengadaan dan pemeliharaan dilakukan secara berkala guna memastikan sarpras benar-benar memberi dampak positif terhadap kegiatan belajar mengajar.

Sejalan dengan itu, penelitian yang ditemukan menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan setelah perencanaan selesai, dengan memperhatikan skala prioritas dan ketersediaan dana. Proses tersebut melibatkan kepala sekolah, bendahara, serta wakil kepala bidang sarana prasarana, dan seluruh pengeluaran didokumentasikan serta dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan secara berkala. Hasil penelitian ini memperkuat bahwa pelaksanaan pembiayaan di satuan pendidikan sebaiknya dilakukan secara terstruktur, transparan, dan melibatkan berbagai pihak demi memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan (Hasnida & Astuti, 2024).

Temuan yang didapat juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS dilaksanakan secara sistematis berawal dari penyusunan anggaran berdasarkan identifikasi kebutuhan dan prioritas, dilanjutkan dengan realisasi sesuai kebutuhan disertai

bukti fisik, serta pengawasan oleh kepala sekolah dan bendahara, termasuk pengawasan eksternal dari dinas pendidikan (Erlangga dkk., 2024). Hal ini sejalan dengan praktik yang dijalankan, di mana anggaran disusun melalui rapat koordinasi stakeholder dan pelaksanaannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan dana BOS. Keseluruhan proses pelaksanaan ini mencerminkan komitmen pihak sekolah dalam mengelola dana secara bertanggung jawab, serta berorientasi pada peningkatan kualitas fasilitas pendidikan yang pada akhirnya berdampak pada mutu layanan pembelajaran bagi peserta didik.

Pengawasaan Manajemen pembiayaan Dalam mengembangkan sarana Prasarana pembelajaran

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam manajemen pembiayaan, khususnya dalam pengelolaan dana yang digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, dan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana (waka sarpras) SMP, ditemukan bahwa pengawasan dilakukan secara terencana, sistematis, dan melibatkan berbagai pihak di lingkungan sekolah.

Kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama menyampaikan bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana, khususnya yang digunakan untuk sarana dan prasarana, dilakukan secara langsung dan melekat. Setiap pengajuan pembiayaan maupun pelaksanaan pengadaan selalu melalui proses verifikasi dan pengecekan. Kepala sekolah memastikan bahwa barang yang diadakan benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan sebelumnya, serta penggunaannya mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Dalam wawancara beliau menyatakan:

> Setiap bulan saya bersama bendahara memeriksa laporan penggunaan dana. Kami cocokkan pengeluaran dengan RKAS, lalu melihat apakah betul sesuai kebutuhan. Kalau ada selisih atau ketidaksesuaian, langsung kami tanyakan agar segera diperbaiki. Jadi pengawasan internal ini rutin, tidak menunggu akhir semester. Saya ingin semuanya tertib dan bisa diperiksa kapan saja.

Bendahara sekolah menambahkan bahwa dirinya selalu siap diaudit karena semua dokumen dicatat dan disimpan dengan baik:

> Setiap pengeluaran dicatat di buku kas umum dan kami lengkapi dengan bukti nota atau kuitansi. Kalau ada pemeriksaan dari kepala sekolah atau pengawas, semua dokumen bisa langsung diperlihatkan. Biasanya tiap akhir triwulan kami juga buat laporan realisasi penggunaan dana BOS untuk dilaporkan ke dinas. Jadi semua tercatat rapi.

Dari sisi teknis, Waka Sarpras memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kesesuaian antara barang yang diadakan dengan daftar kebutuhan. Setelah pengadaan dilakukan, ia turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi fisik barang, kualitas, dan kelengkapan sesuai spesifikasi. Ia juga membuat laporan hasil pengawasan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan tahun berikutnya.

Temuan yang sejalan juga menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan secara kolaboratif dan menyeluruh berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan

sarana dan prasarana sekolah. Pengawasan internal dan eksternal yang terkoordinasi dengan baik mampu meningkatkan efisiensi penggunaan dana serta memastikan pemenuhan kebutuhan belajar siswa secara optimal (Anggira, 2023). Penelitian selanjutnya menegaskan pentingnya audit internal dan audit eksternal yang terintegrasi melalui mekanisme seperti aplikasi ARKAS, pelibatan pemangku kepentingan, dan regulasi yang terkoordinasi untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Temuan ini sejalan dengan praktik di SMP, di mana pengawasan rutin terhadap pelaksanaan dana BOS melalui audit dan pemeriksaan, melibatkan Dinas Pendidikan, terbukti meningkatkan efektivitas meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM pengawas dan komunikasi yang kurang optimal (Anjani & Fatikhasari, 2025).

Evaluasi Manajemen pembiayaan dalam mengembangkan Sarana Prasarana Pembelajaran

Evaluasi merupakan salah satu komponen utama dalam siklus manajemen yang berfungsi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, termasuk dalam hal pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran. Evaluasi tidak hanya dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan, kendala, serta potensi perbaikan ke depan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, yaitu Waka Sarpras beliau menyatakan bahwa:

> Evaluasi kami lakukan dengan cara senantiasa memperhatikan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kami lihat secara langsung, apakah masih layak digunakan atau sudah perlu perbaikan. Kalau ada kerusakan, kami segera perbaiki sebisa mungkin. Yang ringan kami tangani sendiri, sementara yang berat kami usulkan dalam perencanaan berikutnya. Guru-guru dan staf biasanya memberi tahu kalau ada sarana yang mulai rusak atau tidak berfungsi. Itu langsung kami catat sebagai bagian evaluasi.

Temuan yang sejalan juga menunjukkan bahwa evaluasi yang efektif melibatkan kepala madrasah dan waka sarpras melalui kegiatan pemantauan langsung di lapangan, analisis dokumen pelaporan, serta koordinasi antar- stakeholder. Evaluasi dilakukan tidak hanya untuk menilai realisasi anggaran, tetapi juga untuk mengidentifikasi efisiensi, dampak terhadap pembelajaran, serta tindak lanjut perbaikan untuk perencanaan selanjutnya (Murniyanto, 2024). Penelitian yang ditemukan juga menunjukkan bahwa evaluasi manajemen dana BOS meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang dilaksanakan secara sistematis melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan verifikasi, sesuai Petunjuk Teknis BOS (Hidayat dkk., 2025).

SIMPULAN

Penerapan manajemen pembiayaan dalam pengembangan sarana dan prasarana di SMP dilaksanakan melalui empat tahap. Perencanaan dilakukan di awal tahun ajaran melalui rapat kerja dan dituangkan dalam RKAS dengan mengacu pada SNP, dengan prioritas pada perbaikan ruang kelas, toilet, pengadaan media pembelajaran, dan kebutuhan laboratorium. Pelaksanaan dilakukan sepanjang tahun dengan memanfaatkan dana BOS triwulan yang mencakup pengadaan sarpras baru sekaligus pemeliharaan

fasilitas yang ada. Pengawasan dilakukan secara internal oleh kepala sekolah dan bendahara setiap bulan, serta eksternal oleh pengawas sekolah, tim BOS kabupaten, dinas, dan komite sekolah setiap semester, baik melalui laporan maupun verifikasi lapangan. Evaluasi dilaksanakan tiap semester dan akhir tahun ajaran melalui rapat, sehingga hasilnya menjadi masukan untuk memperbaiki perencanaan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, A.N., & Falah, S. (2024). Manajemen pembiayaan dalam meningkatkan sarana dan prasarana. *Al-Munadzomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *3*(2), 105-117. https://doi.org/10.51192/almunadzomah.v3i2.772

Aljannah, S., & Khoiri, Q. (2023). Efisiensi anggaran pendidikan dan akuntabilitas dana BOS terhadap peningkatan mutu pendidikan. *Journal on Education*, *5*(3), 8172-8183. Diakses dari https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1605

Anggira, T. (2023). Pengawasan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 6 Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, *4*(3), 119–126. https://doi.org/10.46730/japs.v4i3.118

Anjani, E. P., & Fatikhasari, A. R. (2025). Strategi optimalisasi peran audit dalam menciptakan tata kelola dana BOS yang akuntabel dan transparan: Studi literatur. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, 2*(5), 775-786. https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i5.1262

Erlangga, R. D., Suryadi, & Hayati, F. (2024). Pengelolaan pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (Studi Deskriptif Penggunaan Dana BOS Sekolah). *Journal on Education*, *6*(2), 10976-10983. https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4886

Fadhila, H. (2024). *Manajemen pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan*. https://doi.org/10.31219/osf.io/9ukpy

Fadilah, N., Haeruddin, M.I.M., & Nurman. (2023). Penerapan manajemen keuangan sekolah di SMP Negeri 1 Bajeng Kabupaten Gowa. *Manabis: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2*(2), 161–172. https://doi.org/10.54259/manabis.v2i2.1775

Fadli, N. (2023). Analisis pengelolaan keuangan sekolah (Studi kasus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Kabupaten Bener Meriah). (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh).

Hakim, M.N., & Atoillah, N. (2024). Pengelolaan sumber keuangan dan komite sekolah sebagai upaya peningkatan mutu SMP Negeri 1 Bangil. *At Tadbir: Islamic Education Management Journal*, *2*(1), 1–12. https://doi.org/10.54437/attadbir.v2i1.1508

Hasnida, & Astuti, R. (2024). Manajemen keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam*, *5*(2), 359–370. https://doi.org/10.54150/thawalib.v5i2.465

Hidayat, S., Mahsun, M., & Sutrihasyini, A. (2025). Evaluasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi di SDN 1 Sadangkulon Kec. Sadang Kab. Kebumen. *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia*, *3*(2), 331–346. https://doi.org/10.32477/jrima.v3i2.1191

Kurniawati, F.N.A. (2022). Meninjau permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dan solusi. *AoEJ: Academy of Education Journal*, *13*(1), 1–13. https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.765

Majid, L. A. (2021). Implementasi manajemen berbasis sekolah di MA Al- Mubarok

Lampung Tengah. *Dimar: Jurnal Pendidikan Islam*, *3*(1), 1–12. https://doi.org/10.58577/dimar.v3i1.47

Murniyanto. (2024). Manajemen pembiayaan dalam mengembangkan sarana dan prasarana berbasis ICT di MTs Muhammadiyah Rejang Lebong. *Jurnal Literasiologi*, *11*(2), 80-92. https://doi.org/10.47783/literasiologi.v11i2.705

Nauraida, I.D., & Triwiyanto, T. (2024). *Hambatan dalam implementasi manajemen sarana dan prasarana di sekolah: Sebuah meta-analisis*. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika, 2*(4), 35-45. https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i4.448

Rohimin, M., Annur, S., & Ibrahim. (2024). Pengawasan pemeliharaan sarana prasarana di SMAN 1 Tulung Selapan. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, *5*(4), 4450–4462. https://doi.org/10.54373/imeij.v5i4.1601

Sa'diah, E. H. (2021). Manajemen pembiayaan dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN Kota Batu (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Shabrina, A. H., & Khoiriyah, H. (2024). Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan sarana dan prasarana di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Pusat Sadeng. *Jurnal Manajemen Pendidikan Al-Multazam*, *6*(1), 8–16. https://doi.org/10.54892/jmpa.v6i1.2

Utami, R. (2020). *Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di MTs Al- Manar Nurul Iman Sidamanik*. *Continuous Education: Journal of Science and Research, 2*(1), 47–60. https://doi.org/10.51178/ce.v2i1.186

Yudianto, Barlian, U. C., Defauzi, P., Ahadiat, Rusmana, J., Ardiana, L., Kusmiyati, N., Nartila, N., Ramdhani, N., Erawan, R. D. T., Trianugrahwati, D., Alam, R., Haryani, S., Yuniawati, Yuningsih, Y., & Habibi, M. F. (2023). Manajemen pembiayaan pendidikan: Overview implementasi pembiayaan pendidikan di satuan-satuan pendidikan. Cirebon: Penerbit P4I.